

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan krisis global karena emisi gas rumah kaca (GRK) terus meningkat, yang mengancam stabilitas iklim di seluruh dunia. Efek rumah kaca adalah sebuah proses di mana molekul gas tertentu di atmosfer menahan panas dari radiasi matahari yang seharusnya terlepas kembali ke angkasa, sehingga menyebabkan pemanasan permukaan Bumi (Febriani Irma, 2024). Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO₂), berperan dalam mempercepat pemanasan global. Kondisi ini kemudian memicu meningkatnya frekuensi maupun intensitas bencana lingkungan, seperti kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan di berbagai wilayah. Pada tahun 2024, jumlah emisi karbon dioksida (CO₂) diperkirakan mencapai 41,6 miliar ton, meningkat dibandingkan 40,6 miliar ton pada tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 37,4 miliar ton berasal dari aktivitas berbasis bahan bakar fosil, sementara sisanya dihasilkan oleh perubahan dalam penggunaan lahan (Friedlingstein et al., 2025).

Perubahan iklim memiliki konsekuensi luas yang tak hanya mengancam ekosistem alam, tetapi juga dapat memengaruhi aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat (Abbass et al., 2022). *Paris Agreement* yang disepakati pada tahun 2015 menjadi langkah signifikan dalam gerakan internasional untuk menangani perubahan iklim. Kesepakatan ini menargetkan pembatasan kenaikan temperatur global agar tetap berada di bawah 2°C, serta mengupayakan agar peningkatannya tidak melebihi 1,5°C (Ekardt et al., 2022). Diperlukan tindakan yang cepat dan substansial untuk menurunkan emisi gas rumah kaca agar krisis iklim dapat tertangani secara efektif. Emisi global perlu mencapai titik puncaknya tidak lebih dari tahun 2025, kemudian mengalami penurunan bertahap sebesar sekitar 43% pada 2030, 60% pada 2035, dan 69% pada 2040 jika dibandingkan dengan level emisi tahun 2019.

World Resources Institute (WRI) (2022) menjelaskan bahwa apabila semua negara memenuhi komitmen iklim mereka saat ini, maka emisi gas rumah kaca (GRK) global hanya akan berkurang sekitar 7% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2019. Jumlah tersebut masih sangat tidak mencukupi untuk mencapai batas pengendalian kenaikan temperatur bumi. (Putri et al., 2022) menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* melalui UU No. 16/2016 berperan dalam mendorong pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan. Indonesia dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2022 menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% tanpa syarat dan 43,20% dengan dukungan internasional, dibandingkan skenario *business-as-usual* pada tahun 2030.

Pada 23 September 2022, Indonesia menyerahkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) kepada Sekretariat *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai wujud peningkatan komitmen dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam dokumen tersebut, target penurunan emisi tanpa syarat dinaikkan dari 29% menjadi 31,89%, sedangkan target penurunan emisi bersyarat juga ditingkatkan dari 41% menjadi 43,20%. Pembaruan ini menjadi bagian dari proses menuju NDC kedua Indonesia yang disesuaikan dengan strategi jangka panjang untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim tahun 2050. Tujuan utamanya adalah mencapai *net-zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat (NDC, 2022).

Menurut data dari *Global Carbon Project* (2023), emisi karbon Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 733 MtCO₂, atau sekitar 1,8–1,9% dari total emisi global. Meski terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, Indonesia masih menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tingginya emisi tersebut terutama dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta aktivitas industri (Jamaludin et al., 2020).

Pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*) merupakan bentuk pelaporan atas emisi gas yang timbul dari proses pembakaran berbagai bahan yang mengandung karbon. Gas seperti CO₂ dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil

maupun biomassa, termasuk bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, serta sumber energi lain yang memiliki kandungan hidrogen dan karbon (Putri et al., 2022). Pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*) hingga saat ini masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), sehingga tidak seluruh perusahaan menyajikan informasi tersebut dalam laporan mereka. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya mengacu pada pedoman perhitungan emisi karbon yang merujuk pada CO₂ Protocol, yakni standar yang dikembangkan oleh *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) bersama *World Resources Institute* (WRI), serta ketentuan yang direkomendasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNEP) (Anshari & Isnalita, 2020).

Fenomena pada penelitian ini berfokus pada sektor energi, karena sektor energi merupakan sumber emisi karbon terbesar di Indonesia. Data kementerian ESDM menunjukkan bahwa total emisi sektor energi dalam skenario *business-as-usual* (BAU) meningkat dari 735,6 juta ton CO₂ pada 2021 menjadi 860,9 juta ton CO₂ pada 2024, menggambarkan bahwa tanpa intervensi tegas, beban emisi sektor ini terus mengalami peningkatan signifikan (ESDM, 2024). Upaya mitigasi pemerintah memang telah menghasilkan penurunan emisi sebesar 127,67 juta ton CO₂ pada 2023, namun capaian tersebut belum cukup menahan tren kenaikan emisi jangka panjang, terlebih intensitas emisi per kapita masih berada di angka 0,524 ton CO₂ pada 2024. Kondisi ini juga tercermin pada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), yang kini menghadapi tuntutan transparansi lebih tinggi dari regulator dan investor. Medco Energi sebagai perusahaan migas berintensitas emisi tinggi telah mencatatkan pengurangan lebih dari 1,5 juta ton CO₂ sejak 2019, termasuk penurunan tahunan 181.727 ton CO₂ pada 2024 melalui program *flare avoidance* (MedcoEnergi, 2024).

Perusahaan-perusahaan energi juga menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan praktik usaha yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa di antaranya, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Indominco Mandiri Tbk. Direktur Utama PTBA, Suryo Eko, menegaskan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dengan mulai mengembangkan investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT), meskipun

aktivitas utama di sektor batu bara masih tetap berjalan. Di sisi lain, Presiden Direktur PT Indominco Mandiri, Bramantya Putra, menjelaskan bahwa perusahaan sedang menyusun peta jalan pengurangan emisi karbon, termasuk melakukan identifikasi dan penghitungan terhadap jejak karbon dari seluruh aktivitas operasional. Salah satu langkah konkret yang telah diimplementasikan adalah penggunaan panel surya (solar PV), yang dalam waktu kurang dari satu tahun mampu menurunkan emisi karbon hingga 192 ton (Melja et al., 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menerapkan teori Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam menjelaskan praktik pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan menjadi bagian akhir dari proses akuntansi, di mana entitas menyajikan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan mencakup data yang relevan serta ringkasan kebijakan yang sesuai dengan standar akuntansi. Pengungkapan emisi karbon bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan terkait isu pemanasan global dan perubahan iklim. Melalui pengungkapan ini, perusahaan dapat menjelaskan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi pengurangan emisi, peralihan ke energi terbarukan, atau peningkatan efisiensi energi (Angelina & Handoko, 2023).

Adapun beberapa faktor yang bisa dapat berpotensi mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam mengungkapkan *carbon emission disclosure* adalah *corporate governance* dan kinerja lingkungan. Menurut (Tanjung, 2023) *corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengarahan perusahaan yang terbentuk melalui mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme eksternal mencakup pengaruh regulasi pemerintah, pasar modal, serta kreditor, yang berfungsi mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan. Sementara itu, mekanisme internal meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan, serta praktik manajerial yang dijalankan pemegang saham dan pihak direksi. Kedua mekanisme tersebut berperan penting dalam memastikan perusahaan dikelola secara efektif, transparan, dan mampu menjalankan

keputusan strategis yang mendukung tujuan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Corporate governance memiliki peran penting dalam meningkatkan *carbon emission disclosure* karena mekanisme tata kelola yang kuat seperti efektivitas dewan, keberadaan komite audit, dan kepemilikan institusional mendorong transparansi serta pengawasan terhadap isu lingkungan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa struktur tata kelola yang baik mampu memperkuat kualitas pengungkapan emisi karbon, sebab pengawasan manajerial yang ketat dan keterlibatan pemegang saham institusional meningkatkan dorongan perusahaan untuk melaporkan informasi karbon secara lebih akuntabel (Rizky & Aini, 2023).

Penelitian terdahulu terkait *carbon emission disclosure* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus pada peran tata kelola perusahaan. (Firmansyah et al., 2021) mengukur tata kelola perusahaan menggunakan indeks yang merujuk pada SEOJK No. 32/2015 dan menemukan bahwa praktik tata kelola yang baik berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Selanjutnya, (Made & Ayu, 2025) menilai tata kelola melalui mekanisme seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit, namun hasilnya menunjukkan bahwa seluruh mekanisme tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Sementara itu, (Akhsani & Sumarta, 2025) mengukur tata kelola berdasarkan struktur kepemilikan dan menemukan bahwa kepemilikan institusional, manajerial, dan publik berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*, sehingga semakin besar porsi kepemilikan tersebut justru menurunkan tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon.

Faktor selanjutnya yang berpotensi mempengaruhi *carbon emission disclosure* oleh perusahaan adalah kinerja lingkungan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pengukuran kinerja lingkungan sendiri dilakukan melalui sistem peringkat PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Putri et al., 2022).

Adapun pengaruh *carbon emission disclosure* dengan kinerja lingkungan Menurut (Purnayudha & Hadiprajitno, 2022) Terdapat keterkaitan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan emisi karbon, di mana perusahaan dengan kinerja lingkungan rendah cenderung enggan melakukan pengungkapan guna mengurangi risiko penilaian negatif. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik lebih terbuka dalam mengungkapkan emisi karbon secara sukarela, sebagai strategi untuk memperkuat citra ramah lingkungan dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rini et al., 2021) dan (Purnayudha & Hadiprajitno, 2022) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) dan (Almuaromah, 2022), menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan temuan pada faktor-faktor yang memengaruhi *carbon emission disclosure*. Pada variabel *corporate governance*, beberapa penelitian seperti Firmansyah et al. (2021) menemukan pengaruh positif, namun penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan ketika menggunakan mekanisme tata kelola tradisional, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan *Corporate Governance Index* (CGI) dari Tanjung (2023), yang menilai tata kelola melalui 15 elemen seperti kode etik, *whistleblowing system*, pengungkapan *beneficial owner*, proporsi komisaris independen, audit *big four*, hingga kepatuhan terhadap sanksi pasar modal, sehingga memberikan pengukuran yang lebih akurat. Pada variabel kinerja lingkungan, hasil penelitian sebelumnya juga tidak konsisten, dengan sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif dan sebagian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh. Dengan adanya inkonsistensi pada keempat variabel tersebut serta mempertimbangkan bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, penelitian ini menghadirkan *novelty* melalui penguatan model pengukuran *corporate governance* dan fokus pada sektor energi

dengan judul: **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat *carbon emission disclosure* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) pada perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap tingkat *carbon emission disclosure* perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan kinerja lingkungan secara simultan terhadap *carbon emission disclosure*.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam konteks *carbon emission disclosure* serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti *corporate governance* dan kinerja lingkungan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan praktik pelaporan emisi karbon sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait tata kelola perusahaan dan kebijakan lingkungan.

3. Manfaat bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi sejauh mana perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, khususnya emisi karbon, yang dapat memengaruhi citra dan kinerja jangka panjang perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan masalah serta tujuan peneliti. Maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yaitu sebagai berikut:

1. Objek pada penelitian ini yang dibahas dibatasi hanya pada sektor energi.
2. Ruang Lingkup masalah pada penelitian ini yang dibahas dibatasi hanya pada *Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*
3. Populasi dan sampel pada penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan selama periode 2021-2024.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah serta sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar pada perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini, yang digunakan sebagai alat ukur dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan adalah Teori Stakeholder, pengertian variabel *Corporate Governance*, pengertian variabel Kinerja Lingkungan, pengertian variabel *Carbon*

Emission Disclosure serta menjelaskan tentang kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi beberapa hal antara lain tentang metode penelitian seperti kriteria pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, pengukuran variabel penelitian Corporate Governance, Kinerja Lingkungan, dan Carbon Emission Disclosure. Serta Pemilihan model data panel, seperti Uji Chow, Uji Hausman, Uji langrange Multiplier, Serta Uji Asumsi Klasik seperti Uji Normalitas, Uji Multikoleniaritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. dan uji parsial (uji t), uji koefisien determinasi (r^2) dan uji Kelayakan Model (Uji F).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian secara lebih mendetail, termasuk pengujian, analisis data, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil analisis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari data, serta saran yang layak diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi dari penelitian ini.